

## Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan)

Herinto Sidik Iriansyah

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Kusuma Negara, Indonesia  
herinto@stkipkusumanegara.ac.id

### Abstrak

Krisis keuangan Asia dimulai pada tahun 1997 dengan ditandai jatuhnya nilai mata uang Thailand (Bath), pada awalnya krisis mata uang kemudian diikuti dengan krisis keuangan pada lembaga-lembaga keuangan non bank yang harus ditutup karena bangkrut. Krisis ekonomi tersebut diikuti dan menjalar ke Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan negara-negara Asia lainnya. Lembaga-lembaga Internasional bereaksi membantu krisis Asia yang pada awalnya *The International Monetary Fund* (IMF) setelah diminta bantuan oleh negara-negara Asia memberikan bantuan. Banyak analisis yang diberikan para pakar keuangan, ekonomi dan politik, salah satunya adalah Weiss dan Hobson yang bersangkutan menganalisis bahwa krisis ekonomi Asia penampakan Dua Wajah yakni; wajah eksternal yang berada di wilayah Deep Crisis dan wajah external berada di wilayah *ordinary crisis*, sedangkan krisis tersebut terjadi dari peran aktor-aktor internasional baik state maupun non state actor. Pendekatan kebijakan sosial yang diterapkan melakukan langkah-langkah welfare state, dengan program-program kesejahteraan yang dijalankan oleh Korea Selatan meliputi reformasi dibidang tenaga kerja, pasar dan keuangan, BUMN dan kebijakan sosial yang aktif untuk memberikan jaminan sosial bagi pengangguran atau bagi mereka yang menjadi miskin di masa reformasi ekonomi nasional. Weiss dan Hobson menyimpulkan bahwa kapitalisme terpimpin (*state guided capitalism*) merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis Asia.

Kata kunci: krisis asia, kapitalisme dan negara kesejahteraan.

Dikirim: 15 Juni 2020

Direvisi: 3 Juli 2020

Diterima: 4 Juli 2020

### Identitas Artikel:

Iriansyah, H. S. (2020). Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan). *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12(1), 53-60.

## PENDAHULUAN

Asia mengalami krisis keuangan yang dimulai dengan jatuhnya nilai mata uang Bath Thailand pada pertengahan Juni 1997. Mula-mula sebagai krisis mata uang. Akhirnya 58 lembaga keuangan non-bank harus ditutup karena bangkrut. Krisis ini lalu menjalar ke Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Filipina dan bahkan Singapura. Mata uang baht, won, ringgit dan rupiah mengalami depresiasi yang tajam. Tahap berikutnya adalah menjalarnya krisis mata uang ke bursa saham. *Explanation* pertama adalah gejala ini adalah reaksi terhadap *policy* pemerintah yang menaikkan tingkat bunga untuk menegatkan likuiditas. Ini adalah gejala klasik dan konvensional dan menjadi resep pertama IMF. Kalau tingkat bunga tinggi maka harga saham turun.

Dunia internasional mengulurkan tangannya untuk membantu Asia. Mula-mula IMF, setelah diminta oleh pemerintah negara yang bersangkutan, seperti di

Thailand dan Indonesia. Amerika Serikat dan Jepang langsung turun tangan di Indonesia. Alasannya adalah mereka lebih takut dampak imbas regional pada waktu Indonesia terserang. Penanggulangan di Indonesia tidak membuahkan hasil hingga Korea Selatan harus meminta bantuan IMF (Tarmidi, 1998).

Dunia internasional, khususnya Amerika, menjadi lebih prihatin. Jika penyakit Asia Tenggara sampai menulari Jepang dan Jepang akhirnya mengalami kemunduran ekonomi, maka ekonomi Amerika Serikat, dan mungkin juga Eropa, akan kena imbasnya. Defisit perdagangan Amerika akan meningkat lagi kalau Asia mengurangi impornya dan mulai menggenjot ekspornya dengan kurs mata uang yang melemah.

Perbankan di Korea Selatan, Indonesia dan Thailand ambruk dan banyak bank yang ditutup. Sektor riil juga mengalami pukulan hebat, banyak perusahaan tutup dan pengangguran meluas di negara-negara tersebut. Krisis ekonomi ini mengejutkan karena fundamental ekonomi Asia dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Krisis Asia

Banyak analisis yang diberikan oleh banyak pakar keuangan, pakar ekonomi dan pakar ekonomi-politik untuk peristiwa krisis kapitalisme di Asia 1997-1999. Salah satunya adalah analisis yang diberikan Weiss & Hobson (2003) dari Universitas Sidney, Australia. Dalam buku *State Power and Economic Strength Revisited, What 's so special about the Asian crisis?* oleh Weiss & Hobson (2003) memberikan analisis tentang peran Negara yang kurang kuat dalam pengorganisasian ekonomi dan aktor-aktor internasional yang menyebabkan terjadinya krisis kapitalisme di Asia pada 1997-1999. Lebih lanjut, ada hipotesa awal bahwa krisis kapitalisme Asia 1997-1999 menunjukkan bahwa kekuatan negara tidak relevan dengan kekuatan ekonomi dalam sebuah dunia ekonomi yang semakin terintegrasi atau globalisasi (Weiss, 2000). Tesis yang berbeda dengan tesis mereka sebelumnya tentang *States and Economic Development*.

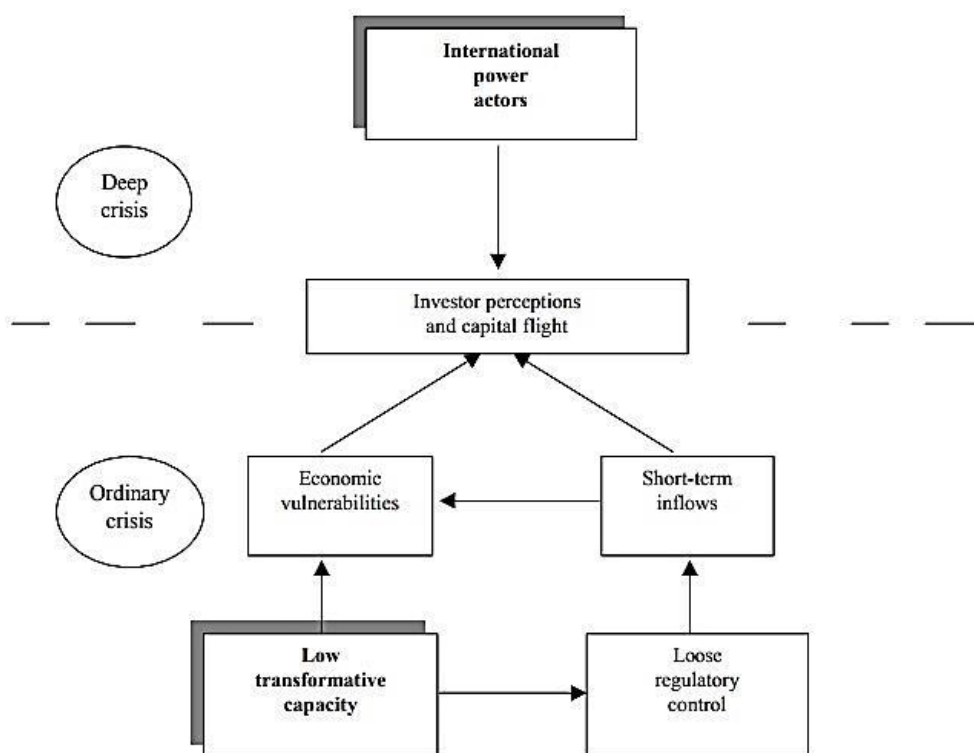
Weiss & Hobson (2003) mengajukan pertanyaan apakah tesis tentang *States and Economic Development* telah dilemahkan oleh ekonomi global dan krisis ekonomi? Jawabannya diuraikan dalam dua bagian. Pertama, uraian analisis historis terhadap respon yang berbeda-beda dari negara-negara terhadap tekanan eksternal. Negara merupakan variabel penting menghadapi krisis dari luar untuk mempertahankan kondisi ekonomi negara. Kedua, uraian yang mendeskripsikan bahwa kekuatan negara memiliki peran penting dalam menjelaskan sumber dan tingkat keseriusan krisis kapitalisme Asia. Weiss (1999) menganalisis bahwa krisis berada di wilayah *deep crisis* dan wajah ekonomi di Asia menampilkan dua wajah, yakni wajah eksternal internal yang berada di wilayah *deep crisis* dan wajah internal yang berada di wilayah *ordinary crisis* (Gambar 1). Krisis terjadi dari peran aktor-aktor internasional baik *states actor* maupun *non-state actor*.

Globalisasi memiliki mediator yakni lembaga-lembaga domestik dalam negeri dan oleh kekuatan negara. Semakin stabil kemampuan institusional negara untuk mengkoordinasikan perubahan ekonomi, semakin kuat kemampuan negara untuk mengurangi pengaruh tekanan dari luar. Sebaliknya, semakin lemah kemampuan institusional negara, maka ekonomi negara semakin rentan terhadap tekanan dari

luar (Weiss & Hobson, 2003; Weiss, 2000). Weiss & Hobson (2003) melihat kapasitas negara sangat penting dalam menjaga kekuatan ekonomi. Negara dengan kemampuan institusional yang baik tidak hanya mampu menahan tekanan dari luar, tetapi juga mampu mengubah tantangan dari luar menjadi kesempatan dalam lingkup domestik.

Weiss & Hobson (2003) mendefinisikan kekuatan negara (*state strength*) antara lain sebagai kemampuan negara untuk mengadakan negosiasi dan kolaborasi dengan aktor-aktor sosial terpenting, terutama adalah kelas ekonomi yang dominan. Kekuatan negara menjadi lembaga yang otonom, yaitu pemisahan lembaga-lembaga negara dari kepentingan pribadi dalam negara. Kemampuan infrastrukural, yaitu kemampuan merengkuh sekaligus memerintah masyarakat.

Dengan kata lain, kekuatan negara ditentukan tidak hanya oleh otonomi institusional, tetapi juga kemampuannya aktor maupun nonstates aktor, melekatkan diri secara sosial dengan berbagai komponen masyarakat, untuk membangun "kesalingterikatan yang teratur" (*governed interdependence*), tidak hanya dalam lingkup domestik, tetapi juga dalam lingkup global.



Gambar 1. Dua Wajah Krisis Asia

Sumber: Weiss (1999).

Kajian Weiss & Hobson (2003) ini secara khusus membahas tentang krisis kapitalisme yang dialami Korea Selatan. Krisis yang terjadi di Korea Selatan terjadi karena lemahnya negara mengorganisasi ekonomi dalam negeri dan lemahnya negara menghadapi tekanan dari luar yang mendorong krisis. Dalam kenyataannya, karena perubahan geopolitik dunia setelah Perang Dingin. Amerika Serikat tidak secara besar-besaran membantu Korea Selatan karena ketidakstabilan. Korea Selatan tidak lagi menjadi kepentingan Amerika Serikat.

### **Krisis Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan**

Analisis Weiss & Hobson (2003) ini sangat menarik karena merupakan pandangan yang berbeda yang datang dari pengamat ekonomi-politik Barat yang kebanyakan berhaluan Neo-Liberalisme. Dalam menganalisis krisis kapitalisme Asia, cara pandang Weiss & Hobson bukanlah cara pandang Neo-Liberalisme. Tulisan dua akademisi Australia ini sebaliknya mengkritik peran neo-liberalisme karena telah menyumbang peran besar dalam krisis kapitalisme di Asia. Aktor-aktor internasional yang merepresentasikan Neo-Liberalisme seperti IMF, US Treasury dan Bursa Saham Wallstreet, mendapat kritik dari Weiss & Hobson secara signifikan.

Apa yang terjadi di Asia, oleh para pengamat selalu disebut sebagai krisis finansial. Hampir tidak ada pengamat dan peneliti apalagi, para peneliti di Bank Dunia atau IMF yang menyebut krisis Asia sebagai krisis kapitalisme. Dalam paper ini saya menggunakan istilah krisis kapitalisme untuk menyebut krisis keuangan Asia. Faktanya memang demikian, krisis ekonomi yang terjadi di Asia pada 1997-1999, yang masih dirasakan dampaknya di Indonesia hingga sekarang, merupakan salah satu siklus krisis kapitalisme, sejak terjadinya krisis besar pada 1929-1933 yang disebut *The Great Depression*.

*The Great Depression* (Malaise/Krisis Besar Kapitalisme) di Amerika Serikat, dimulai dari Wall Street (bursa saham New York) pada Oktober 1929. *Great Depression* tidak hanya menimbulkan kehancuran ekonomi dan pengangguran yang meluas, namun juga terjadi degradasi kemanusiaan. *Great Depression* terjadi, di bawah keyakinan paham Kapitalisme, karena ketidakseimbangan (disequilibrium) pasar sehingga mengakibatkan malapetaka ekonomi.

Krisis kapitalisme ini di Amerika melahirkan dua reaksi dari dua aliran pemikiran. Aliran pertama yang dijalankan oleh Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt dengan program kesejahteraan yang disebut sebagai *The New Deal* yang lebih menghendaki keadilan sosial. Aliran kedua disponsori antara lain oleh Hoover, mantan Presiden (1929-1933) yang digantikan Roosevelt mengkritik bahwa kebijakan *The New Deal* tentang welfare kesejahteraan yang disebut sebagai *The New Deal* yang lebih state merupakan ancaman yang serius terhadap tradies Amerika yakni liberty. Aliran ini didukung juga oleh para politisi dan akademisi antara lain Roco Pound, ahli hukum berpengaruh saat itu dan pengajar hukum di Universitas Harvard. Sebagaimana Hoover, Pound juga menganggap paham welfare state hanya akan membawa negara itu menyimpang dari tradisi Amerika. Aliran ini yang kemudian disebut sebagai Neo-Liberalisme. Aliran Neo-Liberalisme akhirnya menang dan menjadi sangat kuat di bawah kepemimpinan Presiden Ronald Reagan. Di Inggris, Neo-Liberalisme berkembang sangat kuat pada masa pemerintahan yang cukup lama dari Perdana Menteri Margareth Thacter.

Tata ekonomi dunia ala Neo-Liberalisme ini dengan cepat membawa kehancuran ekonomi di negara-negara berkembang karena tata ekonomi Neo-Liberalisme, selain eksploitatif terhadap sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia negara-negara berkembang, demikian juga menciptakan ketergantungan negara-negara miskin terhadap negara-negara maju.

Proses globalisasi, sebuah ekspresi yang sangat populer yang oleh Dominelli & Hoogvelt (1996) disebut sebagai pengintensifan jaringan-jaringan hubungan sosial dan ekonomi yang luar biasa sedang berlangsung dengan cepat. Karena

pembangunan kesejahteraan sosial kerap dipandang hanya sebagai beban pertumbuhan ekonomi dan simbol intervensi negara, maka berkembanglah suatu keyakinan nihilistik bahwa institusi-institusi kesejahteraan sosial secara intrinsik bersifat tidak ekonomis dan bahkan patologis, di manapun dan dalam kondisi apapun.

Benarkah kapitalisme merupakan sebuah keniscayaan sejarah? Tepatkah kalau suatu negara menerapkan sistem ekonomi kapitalis maka peran dan komitmen negara untuk menyangga keadilan dan kesejahteraan sosial harus dihapuskan? Kapitalisme bukanlah keniscayaan sejarah, melainkan sebagai gagasan dan sistem yang menyimpang dan merugikan rakyat banyak. Untuk mencapai keseimbangan ekonomi, dibutuhkan peran negara untuk menyangga keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi kapitalisasi pasti selalu mengalami siklus krisis seperti yang terjadi pada tahun 1929 ketika terjadi Malaise, karena sistem ini tidak memiliki alat kontrol untuk menyeimbangkan situasi. Semuanya diserahkan pada ekonomi pasar. Krisis ekonomi regional yang melanda Asia 1997-1999 adalah salah satu siklus krisis Kapitalisme.

### **Korea Selatan dan Berakhirnya Kapitalisme Asia**

Korea Selatan adalah etalase kapitalisme yang dibangun oleh Amerika Serikat dalam menghadapi Perang Dingin melawan Sosialisme Blok Timur. Perang Korea yang juga disebut sebagai perang proxy antara Amerika Serikat dan sekutu Barat melawan komunis Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet pecah antara 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB (United Nations, 2003).

Sekutu Korea Utara termasuk Republik Rakyat Tiongkok, yang menyediakan kekuatan militer, dan Uni Soviet yang menyediakan penasehat perang dan pilot pesawat, dan juga persenjataan, untuk pasukan China dan Korea Utara. Di Amerika Serikat konflik ini diistilahkan sebagai aksi polisionil di bawah bendera PBB. Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Sejak itu, Amerika Serikat menjadikan Korea Selatan sebagai sebuah "show room" atau "etalase" Kapitalisme yang sengaja dibangun untuk menunjukkan kepada Sosialisme bahwa Kapitalisme lebih unggul dan berhasil.

Berbagai fasilitas utang luar negeri, investasi, dan kemudahan ekspor diberikan Amerika Serikat dan negara-negara Barat sehingga dalam waktu cepat Korea Selatan menjadi negara maju. Negara itu masuk dalam negara-negara triliun dolar dan menjadi satu dari empat macan Asia. Memang jika dibandingkan dengan Korea Utara yang Sosialis, Korea Selatan lebih makmur. Korea Selatan adalah contoh kasus keberhasilan kapitalisme dan di pihak lain menjadi sangat tergantung kepada Amerika Serikat. Namun demikian, krisis kapitalisme yang dimulai dengan krisis keuangan 1997-1998 merobohkan Korea Selatan. Krisis yang melanda negara-negara Asia menyisakan kesengsaraan dan keruntuhan ekonomi Asia secara menyeluruh. Akibat krisis tersebut, Korea Selatan mengalami kehancuran ekonomi.

Pasca krisis, Korea Selatan melakukan langkah-langkah ke arah welfare state, bukan lagi meneruskan tradisi Kapitalisme. Program-program kesejahteraan yang

dijalankan Korea Selatan meliputi direformasinya sektor ketenagakerjaan, pasar dan keuangan, BUMN, dan pengenalan inisiatif tentang kebijakan sosial aktif yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial bagi pengangguran atau bagi mereka yang menjadi miskin di masa restrukturisasi ekonomi nasional (Kwon, 2002; 2005).

Inisiatif tentang kebijakan sosial aktif ini dimaksudkan untuk membangun negara kesejahteraan yang produktif. Inisiatif ini meliputi tiga aspek yaitu; Standar Minimum Jaminan Hidup (*Minimum Living Standard Guarantee*) yang menggantikan Program Bantuan Sosial (*Public Assistance Programme* 1965); Program Pensiun Nasional (*National Pension Programme* 1972) untuk semua anggota masyarakat dengan memperbaharui struktur manajemennya dengan meningkatkan aspek kesinambungan keuangannya dan akutabilitasnya; dan Asuransi Kesehatan Nasional (*National Health Insurance*).

Sejak berdirinya Korea Selatan sebagai ciri sistem Kapitalis menitikberatkan pertumbuhan ekonomi dari pada menyediakan perlindungan sosial. Sebelumnya, jaminan kesehatan dan jaminan pensiun hanya didapat oleh mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan raksasa. Sedangkan bagi mereka yang bekerja di perusahaan kecil tidak mendapatkan jaminan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah hanya menjadi regulator berkaitan dengan bagaimana mendanai program kesejahteraan sosial itu.

Korea Selatan dengan demikian menganut sistem negara kesejahteraan developmental yaitu kebijakan politik dari para elite adalah mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sosial.

Pendekatan kebijakan sosial yang diterapkan oleh Republik Korea sangat relevan bagi pembuat kebijakan publik di kawasan Asia Timur dan sekitarnya. Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia tahun 1997-1998 mendesak negara-negara Asia untuk mengambil inisiatif kebijakan sosial yang aktif untuk keluar dari kemelut ekonomi.

Strategi yang diterapkan berhasil menciptakan stabilitas sosial, kohesi sosial dan prospek pembaruan pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan kebijakan proses pengambilan keputusan, Republik Korea mampu menjamin konsensus sosial dan politik berskala besar di antara para politisi dan organisasi-organisasi ketenagakerjaan. Pemerintah juga bertekad untuk mengembangkan suatu Negara Kesejahteraan yang dapat melampaui ketentuan kebijakan Sosial yang diterpa badai krisis ekonomi. Presiden Kim Dae Jung menyokong perspektif kesejahteraan produktif yang mampu mengembangkan kebijakan sosial dan dapat meningkatkan persaingan ekonomi namun tetap menghargai kewajiban sosial setiap anggota masyarakat.

Paket reformasi ekonomi Republik Korea untuk memperbaharui program asuransi kesehatan nasional, program pensiun nasional dan program santunan sosial mengilustrasikan bahwa Korea telah bergerak jauh dari gagasan Negara Kesejahteraan yang developmental yang mensubordinasikan kepentingan sosial atas pertimbangan ekonomi belaka.

Transparansi dan akuntabilitas dalam merumuskan dan mengimplementasi kebijakan untuk menjamin dukungan publik sangat penting bagi pencapaian inisiatif kebijakan sosial yang aktif. Besarnya transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan efisiensi sistem sosial. Kedua asas tersebut juga dapat menjadi medium untuk memelihara dukungan politik bagi penyelenggaraan sistem.

Selain Korea Selatan yang sebelumnya Kapitalis, Bulgaria yang sebelumnya Sosialis kini menerapkan Paham Negara Kesejahteraan. Bulgaria, sebagaimana Korea Selatan, yakin bahwa paham Negara Kesejahteraan merupakan jalan yang cocok untuk keluar dari krisis, baik krisis kapitalisme maupun krisis Sosialisme (Loukanova, 2000; 2015).

Negara kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Menurut Marshall (1965), negara kesejahteraan merupakan bagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Australia, dan Selandia Baru serta sebagian besar negara-negara Eropa Barat dan Utara.

Adam Smith, Bapak Kapitalisme dunia, sebenarnya selain mengajarkan tentang kapitalisme yang individualistik, juga menyisipkan paham welfare state. Smith mengakui bahwa negara juga memiliki tugas untuk melindungi anggota masyarakat melawan ketidakadilan atau penindasan dari setiap anggota masyarakat lainnya. Smith menganjurkan agar negara meningkatkan layanan publik dan menjaga institusi publik agar memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Pendapat Smith tentang tugas-tugas negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas ini, merupakan cikal bakal teori welfare state modern. Berbeda dengan pemikiran tersebut dalam sistem Smith mengakui bahwa negara juga memiliki tugas kapitalisme-liberal terdapat pandangan Laissez-faire yang menolak intervensi negara. Sikap menolak intervensi pemerintah menjadi penyebab *Great Depression* pada 1929.

Keynes mengenalkan prinsip keterlibatan pemerintah, yang kini berkembang menjadi ekonomi makro. Pemikiran ini berkembang menjadi prinsip Welfare State. Bagi prinsip ini, bukan kebebasan yang menjadi nilai tertinggi kehidupan, tapi keadilan. Mekanisme pasar tidak dapat menghasilkan keadilan karena mengarahkan resources yang ada ke tangan yang paling efisien yang jumlahnya sedikit. Keadilan, karenanya, selalu menghendaki keterlibatan pemerintah untuk membantu kaum miskin melalui welfare program dan sistem perpajakan. Pemerintah juga terlibat dalam penyusunan undang-undang dan peraturan lainnya misalnya undang-undang anti monopoli dan anti trust.

Tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain: (1) mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; (2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; (3) mengurangi kemiskinan; Keynes mengenalkan prinsip keterlibatan pemerintah, (4) menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin; (5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people; (6) memberi proteksi sosial bagi tiap warga.

## **KESIMPULAN**

Paper Weiss & Hobson (2003), sebagaimana tema besar yang ditampilkan dalam buku *Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis*, ingin memberikan gambaran berikut pertanyaan tentang apakah Kapitalisme Asia sudah berakhir? Paper tersebut memang tidak secara tegas mengkritik kapitalisme, apalagi

memberikan argumentasi yang mendalam apakah krisis ekonomi yang terjadi di Asia karena kegagalan Kapitalisme mengendalikan equilibrium pasar. Weiss dan Hobson hanya memberikan kesimpulan bahwa Kapitalisme Terpimpin (*State-guided Capitalism*) juga merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis di Asia. Namun juga di lain pihak dikemukakan bahwa Jepang tidak mengalami krisis, walaupun mengalami kesulitan ekonomi jangka panjang kendati menerapkan *state-guided capitalism*.

## REFERENSI

- Dominelli, L., & Hoogvelt, A. (1996). Globalization and the technocratization of social work. *Critical social policy*, 16(47), 45-62.
- Kwon, H. J. (2002). Welfare reform and future challenges in the Republic of Korea: Beyond the developmental welfare state?. *International Social Security Review*, 55(4), 23-38.
- Kwon, H. J. (2005). Transforming the developmental welfare state in East Asia. *Development and Change*, 36(3), 477-497.
- Loukanova, P. (2000). *The welfare state, labour markets and employment policies during the prolonged transition: The case of Bulgaria*. In Year 2000 International Research Conference on Social Security, Helsinki, 25-27. Institute of Economics Bulgarian Academy of Sciences.
- Loukanova, P. (2015). The Bulgarian Labour Market Policies at the End of the Crisis. *Economic Studies*, 24(3), 3-28.
- Marshall, T. H. (1965). The Right to Welfare. *The Sociological Review*, 13(3), 261-272.
- Tarmidi, L. T. (1998). Krisis Moneter tahun 1997/1998 dan Peran IMF. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- United Nations. (2003). Transforming The Developmental Welfare State in the Republic of Korea. *Economic and Social Commission for Western Asia, Social Policy Series*, 6.
- Weiss, L. (1999). State Power and The Asian Crisis. *New Political Economy*, 4(3), 317-342.
- Weiss, L. (2000). Globalization and State Power. *Development And Society*, 29(1), 1-15.
- Weiss, L., & Hobson, J. M. (2003). State Power and Economic Strength Revisited: What's So Special about the Asian Crisis?. In Robinson, R., dkk. (Eds.) *Politics and Markets in the Wake of the Asian Crisis*, 68-91. London: Routledge.